



Patrice Lumumba Sihombing/Kepala Sub Auditorat Kalbar 1 BPK Perwakilan Kalbar Penyerapan Anggaran Pemprov Rendah, Sekarang Pejabat Banyak yang Takut Ditangkap KPK

Kepala Sub Auditorat Kalbar 1 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalbar, Patrice Lumumba Sihombing menyampaikan, supaya Pemerintah Provinsi Kalbar, Pemerintah Kabupaten/Kota tidak perlu takut menggunakan anggaran atau uang negara.

Kendati demikian, ia mengingatkan supaya pemerintah dan pengusaha anggaran jangan semena-mena, terhadap dana negara. Sebab amanah rakyat tetap harus diemban. Supaya kepercayaan publik terhadap pemerintahan tetap selalu ada.

Patrice tak menampik jika belakangan ini penyerapan anggaran Pemerintah Provinsi Kalbar serta kabupaten/kota terbelang rendah. Pemerintah sebagai lembaga eksekutif yang bertugas menjadi eksekutor yang negara harus bekerja supaya pembangunan daerah terus berjalan.

Bagaimana kelanjutan berikutnya? Simaklah perbandingan warawan Harian Rakyat Kalbar dengan Kepala Sub Auditorat Kalbar 1 Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kalimantan Barat, Patrice Lumumba Sihombing selengkapanya:

+Kabar penyerapan anggaran milih tu apakah benar?
-Memang penyerapan rendah. Masalah penyerapan rendah itu bukan tugas BPK. Karena kami bukan pengelola anggaran. Pemerintah yang diberikan kepercayaan itu. Yakni Gubernur, Walikota, Bupati beserta SKPD-nya.

+Isu yang beredar bahwa pemerintah takut menggunakan anggaran. Lantaran diperiksa secara intens oleh BPK, itu bagaimana?
-Ya, kita harus telusuri satu per satu. Pemerintah itu punya rencana yang terstruktur. Makanya setiap kegiatan pemerintah, kita

awasi supaya tidak ada penyelewengan. Tahun depan kita akan terapkan metode pemeriksaan baru, yakni berbasis aktual. Jadi semua kegiatan pemerintah bisa dipantau secara detail.

+Jadi pemerintah takut menggunakan anggaran, karena BPK semakin agresif?
-Kalau penyerapan rendah. Bisa saja kegiatan itu sudah terlaksana, namun dutinya belum keluar.

Misalnya, si pelaksana kerja sudah memberikan jasanya. Tapi pengusaha belum menagih, akhirnya dia masih ngerdip di kas daerah dan tidak terserap.

+Situasi di lapangan saat ini seperti apa sih?
-Sekarang ini pegawai negeri sipil sudah takut untuk menjadi pejabat pembuat komitmen (FPK).

Mereka takut karena kalau ada kesalahan sedikit akan dipantau jaks, polisi dan KPK. Jadi mereka pada takut semua. Mungkin ini adalah faktor terkait penyerapan anggaran yang rendah.

+Peran BPK selama ini seperti apa dan bagaimana?
-BPK tugasnya hanya memeriksa dan pos audit. Misalnya transaksi berjalan sudah dilakukan baru kita datang. Artinya, setelah pemerintah selesai melakukan kegiatan baru BPK periksa. Cara kami memeriksa selama ini begini, misalnya laporan keuangan tahun 2015 baru akan kita periksa tahun 2016.

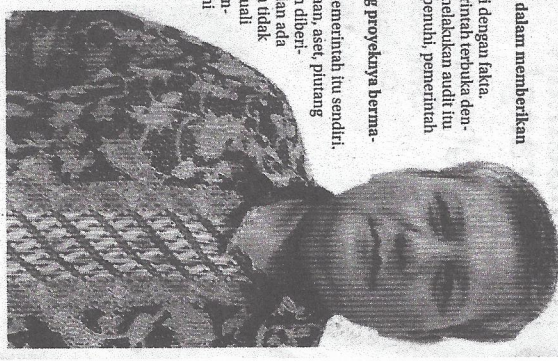
+Kalau laporan pemerintah bogus, ada apresiasi dari BPK?
-Ya, setiap tahun kita mengeluarkan pendapat. Yakni terkait opini, seperti wajar tanpa pengecualian (WTP). Apresiasi itu kita berikan sesuai dari laporan keuangan pemerintah itu sendiri.

+Apakah BPK punya standarisasi dalam memberikan WTP?
-Ada. Pertama, laporan harus sesuai dengan fakta.

Kedua, soal pembatasan. Kalau pemerintah terbuka dengan BPK, tidak ada pembatasan saat melakukan audit itu sudah baik. Kalau dua kategori ini terpenuhi, pemerintah layak diberikan WTP.

+Kok ada pemerintah daerah yang proyeknya bernasib sia bisa dapat WTP?
-Kita lihat dulu laporan keuangan pemerintah itu sendiri. Jadi kita nilai per masing-masing kerjaan, aset, piutang dan beban. Kalau pemerintah daerah diberikan dana sebesar Rp10 miliar, kemudian ada proyek bernasib namun jumlahnya tidak banyak, itu tidak mengganggu. Kecuali diberikan Rp10 miliar, ada penyelewengan Rp1 miliar itu baru mempengaruhi kami dalam memberikan WTP.

+Pesan anda untuk kepala daerah dan jajarannya di Provinsi Kalbar?
-Kalau sudah dikasi WTP, jangan ada pelanggaran.



Reporter: Deska Imanayulata
Redaktur: Andry Soe